



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH: STUDI DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN
KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



OLEH:

DIAN SAPUTRA
NIM. 11524104031

**PROGRAM STRATA SATU
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H/2019 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH: STUDI DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN
KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**OLEH :**

DIAN SAPUTRA
NIM. 11524104031

**PROGRAM STRATA SATU
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H/2019 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul; “ Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar “, yang ditulis oleh:

Nama : Dian Saputra
NIM : 11524104031
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2019
Pembimbing Skripsi


Dr. Arisman, M.Sy
NIK. 130112052

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERSPEKTIF FIQH *SIYASAH*: STUDI DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR” yang ditulis oleh :

Nama : **DIAN SAPUTRA**
 NIM : 11524104031
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 06 November 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu 06 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Ahmad Adri Riva’i, MA

Penguji II
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dian Saputra (1441 H/2019 M): “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan BPD sebagai wadah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemashalatan masyarakat, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Keberadaan BPD diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Namun kenyataannya dilapangan terutama di Desa Simalinyang bahwa kinerja BPD belum berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Simalinyang dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi BPD perspektif fiqh *siyasah*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari BPD 11, kepala desa, sekretaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat keseluruhannya berjumlah 15 orang. Sample dalam penelitian ini sebanyak populasi, teknik sample ini dinamakan dengan teknik “*total sampling*”, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Simalinyang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktor-faktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati kampar, dukungan masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumber daya manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, serta adanya hubungan kekeluargaan. Berdasarkan tinjauan fiqh *siyasah syar’iyyah*, lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-‘aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana *syura*, dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw., menjunjung tinggi konsep *syura*, serta sesuai dengan konsep kepemimpinan.

Kata Kunci : Fungsi, BPD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad saw. berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul “ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar “. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

Ayahanda (Zulfahmi), Ibunda (Darmi), Saudara Sekandung Abang Laki-Laki (Diko Saputra), Saudara Sekandung Adik Perempuan (Della Mustika), dan Saudara Sekandung Adik Laki-Laki (Zul Ikhwan Oktovian) yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun sprituil kepada penulis sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Prof. Dr. H. Ahkmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.

Wakil Rektor I Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II

Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Hajar, M.Ag., Wakil Dekan I

Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag., dan Bapak Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Rahman Alwi, M.Ag., serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Syamsudin Mu'ir, Lc. MA., yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Wasi'ah Simalinyang, Hukum Tata Negara (*Siyasah*), serta Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN 2018) yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah swt. yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah swt. penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah swt. AAMIIN YA ROBBAL 'ALAMIN.

Pekanbaru, 17 Agustus 2019
Penulis,

DIAN SAPUTRA
NIM. 11524104031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Sejarah Singkat Desa Simalinyang	15
B. Demografi Desa	16
C. Keadaan Sosial & Budaya	18
D. Pendidikan.....	18
E. Keadaan Ekonomi	19
F. Keagamaan	20
G. Tugas Umum dan Bagan Struktur Pemerintahan Desa Simalinyang.....	20
H. Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simalinyang	26
BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	28
A. Musyawarah dan Lembaga Perwakilan di Desa	28
1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	28
2. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	30
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	32
4. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	35
B. Musyawarah dalam Praktik <i>Siyasah</i> Islam.....	39
1. Definisi <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i>	39
2. Sejarah Lahir <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i>	42
3. Status, Fungsi, dan Wewenang <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i>	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dasar Hukum Tentang Majelis <i>Syura</i> dan <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i>	47
---	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 56

A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	56
1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.....	56
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.....	62
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.....	67
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	72
1. Faktor Pendukung	72
2. Faktor Penghambat.....	74
C. Tinjauan Fiqh <i>Siyasah</i> Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	76
1. Sejalan dengan yang Dicontohkan Nabi saw	76
2. Menjunjung Tinggi Konsep <i>Syura</i>	81
3. Sesuai dengan Konsep Kepemimpinan	85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan musyawarah. Terbukti pada masa Nabi saw. banyak persoalan umat diselesaikan melalui mekanisme *syura* (permusyawaratan) antara beliau dan para sahabatnya. Bahkan dalam Islam, melaksanakan keputusan hasil musyawarah adalah wajib hukumnya. Tujuan musyawarah tak lain adalah untuk *sharing* ide dan gagasan untuk mencapai apa yang diidealkan bersama. Sebab, tidak mustahil ada ide cemerlang yang tidak diketahui oleh sebagian dari mereka, tetapi diketahui oleh yang lain.¹

Syura telah diaplikasikan dalam kehidupan dan perilaku-perilaku Nabi saw. yang umum, selain wahyu. Sebagaimana diaplikasikan para *Khulafaurrasyidin* sesudahnya. Terutama dalam menyusun kaidah-kaidah (aturan-aturan). Islam telah menetapkan prinsip *syura* dalam lapangan pemerintahan dan mengharuskan (memegangnya) dengan teguh, serta menolak dan melarang kesewenang-wenangan dan tindakan pribadi.

Musyawarah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat berikut kebutuhan-kebutuhan politisnya yang membawa pada kemashalatan. Semua penetapan dalam musyawarah diserahkan kepada manusia, tetapi yang penting adalah menjalankan pemerintahan diawali dari penentuan pemerintah hingga pembuatan undang-undang, politik, dan

¹ Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. ke-2, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi.² Sementara itu, penciptaan partisipasi umat dengan cara meyakinkan agar umat mau ikut dalam keputusan-keputusan politik dan legislatif yang mempengaruhi kehidupannya harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.³

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahlu al-halli wa al-'aqdi* pada zaman *Khulafaurrasyidin*. Pembentukan lembaga *ahlu al-halli wa al-'aqdi* sangat perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemashalatan umat Islam.⁴ Di dalamnya bangsa dan sebagian umat atau kaum cerdik pandai yang mewakilinya ikut terlibat. Sebagaimana juga pemerintah sesudah ia dipilih dan ditentukan dengan jalan *syura* ikut serta didalamnya. Dengan begitu, keikutsertaan antara pemerintah dan rakyat atas umat terwujud. Sempurnalah pengikatan diri pemerintah dengan dua ikatan syari'at dan rakyat, yaitu hukum Allah dan opini umat.⁵

Jadi, musyawarah berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan mempertemukan ide-ide kaum muslimin.⁶ Berkaitan

² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-1, h. 94-95.

³ Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-3, h. 127.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1, h. 142.

⁵ Jubair Situmorang, *op. cit.*, h. 96.

⁶ Abu Yasid, *op. cit.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pentingnya mengembangkan mekanisme musyawarah ini Allah Berfirman sebagaimana dalam surat al-syura 42: 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.* (Q.S. al-syura 42: 38).⁷

Perlu diketahui, perintah musyawarah dalam ayat tersebut sifatnya umum dan mencakup segala aspek kehidupan, baik agama, politik, sosial-ekonomi, dan budaya. Dalam segala sendi kehidupan, bermusyawarah sangat dianjurkan untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik. Karena apa yang dihasilkan adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas.⁸

Di dalam tatanan pemerintahan yang terendah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen/dewan *syuranya* pemerintahan desa. Kajian fiqh *siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.⁹

⁷ Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal, 2010), h. 487.

⁸ Abu Yasid, *op. cit.*, h. 78.

⁹ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 187-188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menciptakan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan).¹⁰

Badan Perwakilan Desa yang selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya kemashalatan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemashalatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas

¹⁰ Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2007), Cet. ke-1, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan kemashalatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam bermasyarakat.

Desa Simalinyang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan ia merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, fungsi pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, fungsi pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain itu, berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan penulis bahwa adanya anggota BPD yang merangkap jabatan, sedangkan dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 26 telah dijelaskan bahwa anggota BPD dilarang merangkap jabatan.

Dari uraian dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simalinyang, serta penulis ingin melihat apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dengan ini penulis menuangkan dalam suatu penelitian dengan judul skripsi, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Supaya lebih terarahnya penulisan ini, penulis membatasi terhadap permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dilihat dari sisi fiqh *siyasah*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, inti atau pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah dilaksanakan di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh *siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan menelaah, apakah BPD benar-benar menjalankan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan, atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi dan malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya akan menghabiskan energi. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh *siyasah* terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Dapat memperkaya *khazanah* intelektual terutama tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perspektif fiqh *siyasah*: studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.¹¹ Adapun langkah-langkah yang sistematis tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.

Menurut Etta Mamang Sangadji & Shopia, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap individu, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap objek penelitian.¹² Khusus untuk penelitian ini objek penelitian yang akan didiskripsikan adalah mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perspektif fiqh *siyasah*: studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet. ke-10, jilid 3, h. 136.

¹² Etta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sample, informant, ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Simalinyang karena adanya anggota BPD yang merangkap jabatan, sedangkan dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 26 telah dijelaskan bahwa anggota BPD dilarang merangkap jabatan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat Desa Simalinyang.

Sedangkan Objek penelitian ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perspektif fiqh *siyasah*: studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Jadi dari pengertian subjek dan objek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, keduanya sama-sama melihat pengaruh sesuatu *treatment*, maka ada variabel yang mempengaruhi dan variabel akibat.¹³

¹³ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi¹⁴ adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari seluruh anggota BPD berjumlah 11 orang, kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, dan 2 orang tokoh masyarakat Desa Simalinyang. Jadi, berjumlah keseluruhannya adalah sebanyak 15 orang yang menjadi populasi.

Sampel adalah sebagian/wakil atau seluruh dari populasi yang diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampelnya dalam penelitian ini 15 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sample jenis ini disebut juga dengan sebutan “*total sampling*”.

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:¹⁵

a. Data Primer

Data primer adalah dua data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.121.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh dari wawancara langsung dari anggota BPD, pemerintahan desa, dan beberapa tokoh masyarakat Desa Simalinyang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, permendagri, peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan daerah, jurnal, website, dan lain-lain yang menunjang sumber data primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).¹⁷
- b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap fungsi BPD perspektif fiqh *siyasah* di Desa Simalinyang.¹⁸
- c. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

¹⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.¹⁹

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

¹⁹ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika dan pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah singkat Desa Simalinyang, demografi desa, keadaan sosial & budaya, pendidikan, keadaan ekonomi, keagamaan, tugas umum dan bagan struktur pemerintahan Desa Simalinyang, serta bagan struktur organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Simalinyang.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas dua hal. Pertama, musyawarah dan lembaga perwakilan di desa, terdiri dari: definisi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sejarah terbentuknya Badan Permasyarakatan Desa (BPD), fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD), serta undang-undang dan peraturan tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Kedua, musyawarah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik *siyasah* Islam terdiri dari: definisi *ahl al-hall wa al-'aqdi*, sejarah lahir *ahl al-hall wa al-'aqdi*, status, fungsi, dan wewenang *ahl al-hall wa al-'aqdi*, dasar hukum tentang majelis *syura* dan *ahl al-hall wa al-'aqdi*.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas 3 hal, terdiri dari: Pertama, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah dilaksanakan di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang. Ketiga, tinjauan fiqh *siyasah* terhadap pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir ini meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Singkat Desa Simalinyang

Pada awal mulanya Desa Simalinyang berada di pinggir sungai Kampar Kiri, dan masyarakatnya pada masa itu jalur transportasi adalah sungai Kampar yang terbentang dari Langgam sampai ke Kerajaan Gunung Sahilan. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat masih bermukim di sepanjang sungai Kampar yang membentuk kelompok di kayu semiang, lama-kelamaan masyarakat sudah berkembang pindahlah ke daratan, kemudian kelompok masyarakat tersebut membuat nama kampung yaitu Simalinyang yang artinya masyarakat tersebut Pengasih dan Penyayang dan diatur oleh aturan Adat Istiadat oleh Ninik Mamak, dan pada waktu itu Ninik Mamak mempunyai Ulayat (Wilayah) Adat.²⁰

Karena jalan darat belum ada, Simalinyang merupakan pelabuhan transportasi lintas sungai yang menghubungkan daerah Kerajaan Gunung Sahilan ke Kerajaan Pelalawan di Langgam (1725-1946). Karena Simalinyang sebagai tempat pelabuhan lintas antar Kerajaan tentu banyak sekali pelayar yang melewati dan singgah, bahkan banyak yang terlantar oleh karena itu, masyarakat Simalinyang memberikan makanan maupun tempat tinggal kepada pelayar tersebut.²¹

²⁰ Sumber Data “*Profil Desa Simalinyang*” Tahun 2019.

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu masyarakat Simalinyang dikenal oleh pelayar masyarakat yang Pengasih dan Penyayang. Seiring dengan berjalannya waktu keadaan negara semakin berkembang, Simalinyang bergeser dipinggir jalan lintas setapak yang menghubungkan Desa Teratak Buluh dengan Desa Lipat Kain. Kemudian jalan setapak tersebut berubah menjadi jalan umum dan masyarakat Simalinyang sudah berkembang menjadi masyarakat desa, pada tanggal 20 Maret Tahun 1983 dicetuskanlah Desa Muda Simalinyang pemekaran dari Desa Sungai Pagar, dan Desa Simalinyang barulah berdiri menjalankan roda pemerintahannya sendiri dengan dua Dusun yaitu Dusun I Simalinyang dan Dusun II Penghidupan kemudian Desa Muda Simalinyang semakin berkembang, dan pada tahun 1993 Desa Penghidupan pemekaran dari Desa Simalinyang. Semenjak saat itu Desa Simalinyang semakin berkembang dan menjadi Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri Tengah pada Tahun 2006 sampai dengan saat sekarang ini.²²

Demografi Desa

Desa Simalinyang sebagaimana terintegrasi dalam Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang berjarak ke Ibu Kota Kecamatan tidak jauh dari Desa Simalinyang, karena Desa Simalinyang adalah Ibu Kota Kecamatan, dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 76,4 Km yang dapat ditempuh lebih kurang 2 jam 11 menit perjalanan.²³

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Simalinyang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Secara geografis Desa ini merupakan daerah dataran tinggi. Apabila dilihat dari luas wilayah, Desa Simalinyang memiliki Luas 8.970 Ha, yang dibagi menjadi 4 Dusun diantaranya 8 RW dan 20 RT, dengan Jumlah penduduk Desa Simalinyang pada Tahun 2017 berjumlah 3.456 jiwa yang terdiri dari penduduk 1.634 perempuan dan 1.822 penduduk laki-laki.²⁴

Desa Simalinyang mempunyai luas wilayah 8.790 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penghidupan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pagar
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Kasih
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mayang Pongkai

Desa Simalinyang juga memiliki 4 (buah) dusun, 8 (delapan) rukun warga (RW), 20 (dua puluh) rukun tetangga (RT), adapun dusun-dusun yang ada di Desa Simalinyang adalah :

1. Dusun I Sei Putaran
2. Dusun II Kampung Baru
3. Dusun III Kampung Bukit
4. Dusun IV Labuh Basah.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan Sosial & Budaya

Penduduk Desa Simalinyang sangat heterogen yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di Desa Simalinyang adalah pemeluk Agama Islam 90%. Sedangkan pemeluk agama minoritas adalah Agama Kristen 10%.

Desa Simalinyang juga memiliki suku masyarakat yang beragam mulai dari Ocu (Melayu) 60%, Jawa 15%, Batak 15%, Nias 5%, dan lain-lain 5%. Suku yang menjadi mayoritas di Desa Simalinyang adalah suku Ocu (Melayu) 60%. Sedangkan minoritasnya adalah Jawa, Batak, Nias, dan lain-lain 40%.

Berdasarkan keanekaragaman penduduk dapat dilihat dari aspek pemeluk keagamaan dan suku. Mayoritas penduduk di Desa Simalinyang memeluk Agama Islam 90% dan suku Ocu (Melayu) 60%, sedangkan pemeluk agama dan suku minoritas adalah Agama Kristen 10% dan suku Jawa, Batak, Nias dan lain-lain 40%. Masyarakat yang mayoritas agama dan sukunya dengan masyarakat minoritas agama dan sukunya, hidup saling berdampingan dengan keanekaragaman sosial dan budaya, kebiasaan masing-masing.²⁶

Pendidikan

Masyarakat Desa Simalinyang pada umumnya adalah desa yang berkembang, adapun riwayat tamatan pendidikan masyarakat di Desa Simalinyang adalah sebagai berikut: Sekolah Dasar (SD) 20%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 15%,

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pondok Pesantren (PONPES) 30%, dan Perguruan Tinggi 10%. Mayoritas tamatan pendidikan di Desa Simalinyang adalah tamatan Pondok Pesantren (PONPES) 30%, sedangkan minoritasnya SD 20%, SMP 25%, SMA 15%, dan Perguruan Tinggi 10%. Adapun lembaga pendidikan yang ada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Gedung TK/PAUD berjumlah 2 buah, terletak di Dusun I Sei Putaran dan Dusun II Kampung Baru.
2. SDN berjumlah 2 buah, terletak di Dusun I Sei Putaran dan Dusun II Kampung Baru.
3. MDA berjumlah 1 buah, terletak di Dusun II Kampung Baru.
4. SMPN berjumlah 1 buah, terletak di Dusun IV Labuh Basah.
5. PONPES/MA Darul Wasi'ah berjumlah 1 buah, terletak di Dusun I Sei Putaran.²⁷

Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Simalinyang bermata pencarian sangat beragam yang terdiri dari Nelayan 15%, Petani 30%, Buruh 25%, Pedagang 15%, PNS 10%, dan lain sebagainya 5%. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Simalinyang adalah Petani dan Buruh 55%, sedangkan minoritasnya adalah, Nelayan, Pedagang, PNS, dan lain-lain 45%. Adapun lembaga sebagai penunjang ekonomi di masyarakat Desa Simalinyang adalah sebagai berikut:

²⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Badan Usaha P&P Bangkinang, PT (Simalinyang) berjumlah 2 buah namun beroperasi 1 buah, terletak di Dusun I Sei Putaran. Sedangkan yang tidak beroperasi terletak di Dusun III Kampung Bukit.
2. PT. Prada Makmur Sejahtera berjumlah 1 buah, yang terletak di Dusun IV Labuh Basah.²⁸

Keagamaan

Masyarakat Desa Simalinyang mayoritas beragama Islam, namun juga terdapat masyarakat beragama lain seperti Kristen, yakni umat muslim berjumlah 90%, umat Kristen 10%. Sehingga jumlah penduduk masyarakat Desa Simalinyang adalah sebanyak 3.456 jiwa.²⁹ Adapun tempat ibadah yang ada di Desa Simalinyang adalah sebagai berikut:

1. Di Dusun I Sei Putaran Masjid berjumlah 2 buah dan Musholla 2 buah.
2. Di Dusun II Kampung Baru Masjid berjumlah 1 buah dan Musholla 2 buah.
3. Di Dusun III Kampung Bukit Musholla 1 buah.
4. Di Dusun IV Labuh Basah Masjid 1 buah dan Musholla 1 buah.³⁰

Tugas Umum dan Bagan Stuktur Pemerintahan Desa Simalinyang

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur-unsur organisasi pemerintah Desa, kedudukan, tugas dan fungsi unit kerja dalam struktur organisasi pemerintahan Desa dapat dijabarkan sebagai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut:

1. Kepala Desa

- a. Kedudukan Kepala Desa:

Kedudukan sebagai alat pemerintah dan unit pelaksanaan pemerintahan desa.

- b. Tugas Kepala Desa:

Tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintah, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

- c. Fungsi Kepala Desa:

Fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.³¹

2. Sekretaris Desa

- a. Kedudukan Sekretaris Desa:

Berkedudukan sebagai unsur pelayanan atau staf dibidang tata usaha kepala desa dan memimpin sekretaris desa.

- b. Tugas Sekretaris Desa:

³¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberi pelayanan ketatausahaan kepala desa.

c. Fungsi Sekretaris Desa:

Fungsinya melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam hal bila kepala desa berhalangan.

3. Kepala Urusan

a. Kedudukan Kepala Urusan:

Berkedudukan sebagai pembantu bidang tugas masing-masing.

b. Tugas Kepala Urusan:

Bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.

c. Fungsi Kepala Urusan:

Berfungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.³²

4. Kepala Dusun

a. Kedudukan Kepala Dusun:

Berkedudukan sebagai untuk pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun:

Bertugas melaksanakan pemerintahan desa di bawah kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya.

c. Fungsi Kepala Dusun:

Berfungsinya melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan desa dan kebijaksanaan kepala desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Bertugas mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Berfungsinya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.³³

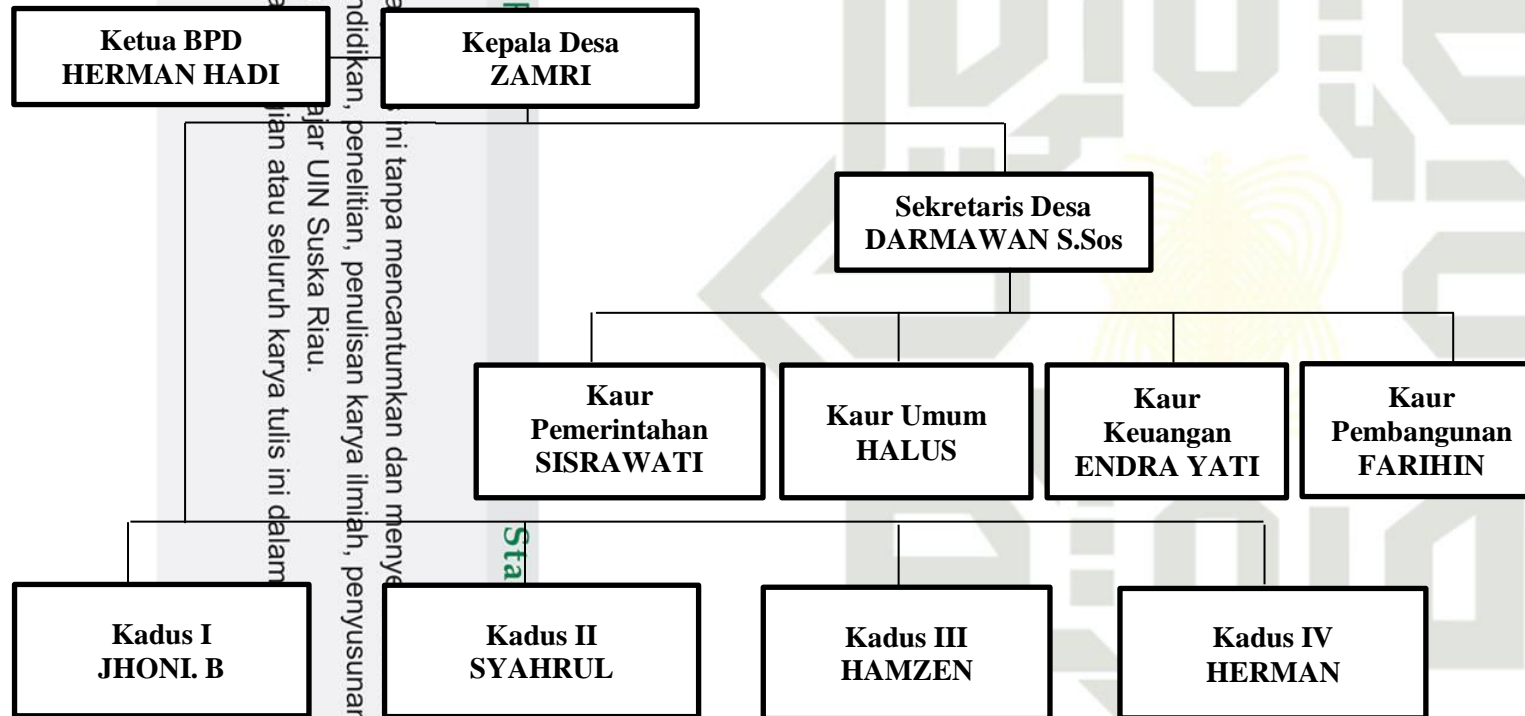
Untuk melihat bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Simalinyang dapat dilihat pada bagan struktur berikut:



³³ *Ibid.*

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simalinyang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar (SK)

Nomor: 140.667/XII/2017 Masa Bakti 2017-2023.



Sumber: Profil Desa Simalinyang Tahun 2019.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simalinyang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Struktur organisasi Badan permusyawaratan Desa Simalinyang disahkan pada Tahun 2013 yang lalu, lembaga ini terbentuk mengingat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pedoman teknis pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simalinyang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar (SK) Nomor 144/BPMPD/294 Masa Bakti 2013-2019 berjumlah 11 orang yang terdiri dari:

1. Ketua BPD: Herman Hadi.
2. Wakil Ketua BPD: Rianto, S.Pd.I.
3. Sekretaris BPD: Andrya Saputra, S.Pd.I.
4. Anggota BPD: Mahzawer, S.Pd.I, Nur Alfandri, SE, Bustari. J, Zulkifli. J, Beni Irawan, Abdul Kosim, Kholisman, dan Jhoni. B.³⁴

Mekanisme pembentukan anggota BPD Simalinyang yaitu dipilih melalui musyawarah mufakat. Mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30 dan 31 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simalinyang dapat dilihat pada bagan ini :

³⁴ *Ibid.*

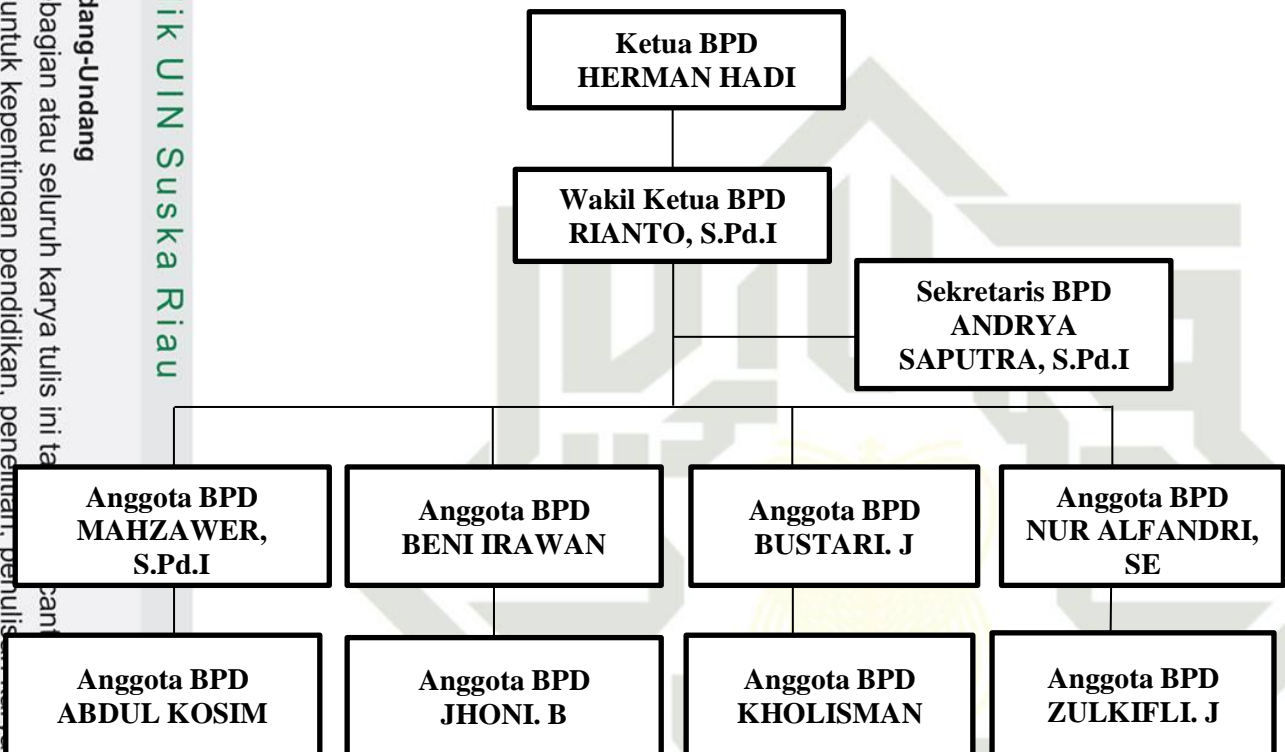
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simalinyang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar (SK) Nomor: 144/BPMPD/294 Masa Bakti 2013-2019.



Sumber: Profil Desa Simalinyang Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Musyawarah dan Lembaga Perwakilan di Desa

1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁵ Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa inilah BPD hadir sebagai lembaga pengaturan dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Rozali Abdullah bahwa Badan Perwakilan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.³⁶ Hanif Nurcholis menambahkan, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 desa dan BPD mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan

³⁵ A. W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.

³⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat tersebut desa bersama BPD dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa dan BPD sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.³⁷ Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan ditingkat desa sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.³⁸ Dalam kamus hukum pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁹

Lebih lanjut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni, lembaga yang

³⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 28.

³⁸ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), h 76.

³⁹ M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Quality Publisher, 2009), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁰

2. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pada awal terbentuknya BPD dimulai dari pasca kemerdekaan Indonesia (1945), namanya badan musyawarah desa praja. Badan musyawarah desa praja, adalah sebagai badan perwakilan dari masyarakat desa praja dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat I, namun keadaan tidak stabil disebabkan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI mengakibatkan upaya mewujudkan desa sebagai entitas otonom selain daerah otonom tingkat satu dan dua tidak dapat direalisasikan. Akhirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 ditinjau kembali sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1966 Tentang Penundaan Realisasi Pembentukan Badan Musyawarah Desa Praja.⁴¹

Pada masa Orde Baru dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Era Reformasi membawa angin

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

⁴¹ Nurhadi, *Menakar Eksistensi BPD Dalam Penyelenggaraan Desa*, dalam <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggraan-desa.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segar bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-Undang ini keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi aktor baru pendorong demokrasi.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah merupakan koreksi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Perubahan-perubahan mencolok terletak pada digantinya istilah Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan lainnya bahwa pembentukan keanggotaan BPD tidak melalui pemilihan langsung melainkan melalui musyawarah untuk menentukan keterwakilan dari masing-masing wilayah.

Dengan ditetapkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016,⁴² mempertegas terbentuknya secara resmi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai sekarang. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan

⁴² Minardi Kusuma, *Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang* dalam <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no-Desa.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa.

Maka UU Desa dan Permendagri memberikan penguatan bagi BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Perwakilan Desa, mereka adalah parlemennya desa/dewan *syura* atau legislasi. Dalam menjalankan fungsinya BPD dan kepala desa harus berkerjasama/bermitra demi kemashalatan masyarakat.

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, atau pertimbangan lainnya. Secara sosiologis, fungsi adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif. Hal ini senada dengan pendapat Soekanto, mengatakan peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁴³

Istilah fungsi berasal dari bahasa Latin yang disebut *functio* berarti jabatan, peranan, kedudukan atau kegunaan. Menurut bahasa Indonesia, kata fungsi berarti dipakai atau digunakan untuk sesuatu. Sedangkan

⁴³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2007), Cet. ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Bahasa Indonesia fungsi ialah, sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.⁴⁴

Cabang kekuasaan legislasi adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislasi. Pengaturan tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai perwakilan rakyat.⁴⁵ Adapun yang menjadi fungsinya adalah sebagai berikut, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dari pemaparan dan uraian diatas dapat dipahami bahwa, Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila yang merupakan mitra kerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga mempunyai beberapa tugas, dan kewenangan guna untuk kemashalatan masyarakat dan terwujudnya demokrasi yang dipimpin.

Adapun tugas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cet. ke-2, h. 110.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 298-299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.⁴⁶

Selanjutnya, sedangkan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tulisan.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁴⁶ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, *op. cit.*, Pasal 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati/walikota melalui camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴⁷

4. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁷ Ibid, Pasal 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan bahwa, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.⁴⁸

Didalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terdapat pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada bagian ketujuh, dan mempunyai 11 (sebelas) pasal yang mendorong kinerja BPD dalam bermitra dengan pemerintahan desa.⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari Tahun 2014, serta dimasukkan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.⁵⁰

⁴⁸ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Sudah Disempurnakan Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan peraturan pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa.⁵¹

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 terdapat pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ketentuan ayat (3) dan ayat (5), dan mempunyai 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 80 yang berkaitan dengan musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh pemerintah desa.⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni Tahun 2015, serta dimasukkan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157.⁵³
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Permusyawaratan Desa.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, *op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat pengaturan tentang BPD yang mempunyai XII BAB dan 76 Pasal.⁵⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember Tahun 2016 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017, serta dimasukkan kedalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89.⁵⁶

B. Musyawarah dalam Praktik *Siyasah* Islam

1. Definisi *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*

Secara etimologi *ahl al-hall wa al-aqd* artinya “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”, menurut Abd al-Hamid al-Anshari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan, bahwa *ahl al-hall wa al-‘aqd* ialah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.⁵⁷

Imam al-Mawardi menyebutkan yang dikutip oleh H.A. Djazuli, ialah orang-orang yang memilih khalifah ini dengan *ahlul iktiyar* yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: *pertama*, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya, *kedua*, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-5, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya, *ketiga*, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tau tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemashalatan pada umat.⁵⁸

Lebih lanjut Imam al-Mawardi⁵⁹ mengemukakan pandangan bahwa menurut fiqh *siyasi* terdapat persamaan konsep majelis *syura*, *ahl al-hall wa al-aqd*, *ahl al-ijtiha*, dan *ahl al-ikhtiyar*. Konsep *ahl al-hall wa al-aqd* telah dikenal sejak masa pemerintahan *khulafa' al-rasyidin*, dan bahkan sebelumnya yaitu di masa Rasulullah saw. hanya saja ide konsep itu mengemuka pada masa pemerintahan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka.

Ahl al-hall wa al-aqd menurut al-Baghdadi yang dikutip oleh Abdul Hamid Isma'il Al-Anshari mengatakan,⁶⁰ mereka yang ahli dalam bidang *ijtiha*. Maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang spesifik misalnya hukum, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang lain yang menopang peran mereka sebagai wakil rakyat dalam menentukan kebijakan demi kemashalatan umat, disamping juga sebagai wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka.

⁵⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet. ke-2, h. 76.

⁵⁹ Imam Al-Mawardi, alih bahasa: Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), h. 96.

⁶⁰ Abdul Hamid Isma'il Al-Anshari, *Al-Syura wa Atsaruh fi al-Dimuqraiyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980), h. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Nawawi yang dikutip oleh Qadir Abu Faris⁶¹ menambahkan, bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para ulama, kepala suku, pemuka masyarakat sebagai unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemashalatan rakyat. Pengertian yang hampir serupa diungkapkan oleh Muhammad Abduh bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* sama dengan *uli al-amr*, *uli al-amr* adalah *ahl al-hall wa al-aqd* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam berbagai keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang kapabilitasnya telah teruji, sehingga *uli al-amr* tersebut adalah golongan *ahl al-hall wa al-aqd* dari kalangan orang muslim yang kredibilitasnya tinggi. Mereka itu adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dan berorientasi pada kepentingan dan kemashalatan publik.

Jubair Situmorang⁶² menjelaskan bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* adalah, orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

Pendefinisian pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* oleh pakar muslim, secara tidak langsung menguraikan kategori orang-orang yang refresentatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan

⁶¹ Qadir Abu Faris, *Al-Nidzam al-Siyasi fi al-Islam*, ter, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), h.

⁶² Jubair Situmorang, *op. cit.*, h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keahlian berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Hanya saja tidak ada kejelasan, apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain, anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi massa.⁶³

Islam memerintahkan seorang pemimpin agar bermusyawarah, di sisi lain dituntut memberi dan menerima nasehat. Selanjutnya akan dapat dilihat bahwa kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan suatu kewajiban yang bersifat umum, mencakup para pemimpin, rakyat atau masyarakat secara keseluruhan.⁶⁴

2. Sejarah Lahir *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Kepemimpinan Rasulullah saw. bersifat demokratis terlihat pada kecenderungannya menyelenggarakan musyawarah. Dalam amal praktiknya Nabi saw. semasa beliau masih hidup, beliau sering kali bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau dalam urusan kenegaraan atau kemasyarakatan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama jika menghadapi permasalahan yang belum tersentuh oleh wahyu Allah, disamping itu Rasulullah saw. banyak menganjurkan umatnya agar senantiasa bermusyawarah, dan selalu menegaskan bahwa umat Islam

⁶³ Artani Hasbi, *Musyawarah & Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Cet. ke-1, h. 174.

⁶⁴ *Ibid*, h. 174-175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tidak meninggalkan komunitas mereka. Dengan demikian, berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihargai dan dihormati. Karena itu, setelah kesepakatan dicapai menjadi kewajiban bagi setiap anggota untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut.⁶⁵

Imam Al Ghazali yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad⁶⁶ menganjurkan pula supaya badan-badan yang menjalankan kekuasaan itu haruslah berbentuk dewan atau majelis yang terdiri dari para ahli yang jujur. Didalam bukunya “*At tibr ul masbuk*”, ditekankannya bahwa majelis musyawarah ialah yang membuat perundang-undangan negara. Apakah sifatnya sebagai badan legislatif dengan segala hak-haknya yang kita kenal sekarang, ataukah bersifat dewan penasehat.

Rasulullah saw. melarang musyawarah yang sifatnya kearah nilai-nilai maksiat, kekufuran, kerusakan, kemurkaan atau keonaran di muka bumi. Termasuk didalamnya, adalah larangan mengesolir diri dari komunitas muslim, yang berarti masuk kategori kufur, dan setiap individu diberi kesempatan untuk berpartisipasi, baik dalam memikirkan pemecahan masalah maupun dalam melaksanakan hasil dari keputusan musyawarah. Kesediaan dan kesiapan Rasulullah saw. sebagai pemimpin dalam mendengarkan pendapat, bukan saja dinyatakan dalam sabdanya, tetapi terlihat dalam praktik kepemimpinannya.⁶⁷

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet. ke-74, h. 504.

⁶⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Al-Bintang, 1975), Cet. ke-5, h. 303-304.

⁶⁷ Artani Hasbi, *op. cit.*, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya ketika terjadi bai'at Aqabah I,⁶⁸ peristiwa Islamnya enam orang Yatsrib yang berbai'at kepada Nabi saw. dan yang nantinya akan menjadi wakil. Setelah menyatakan masuk Islam, mereka berkata kepada Nabi saw. “Sesungguhnya kami meninggalkan suatu kaum dan tidak ada kaum yang terlibat permusuhan dan kejahatan sedahsyat mereka. Mudah-mudahan Allah mendamaikan mereka denganmu. Kita akan mendatangi mereka, kemudian mengajak mereka pada perintahmu dan kami tawarkan kepada mereka agama ini yang kami dapatkan darimu”.

Peristiwa ini kemudian menjadi dalil kuat sebagai komitmen Nabi terhadap prinsip musyawarah. Rasulullah saw. menyerahkan secara penuh kepada enam orang Yatsrib untuk memilih sendiri wakil-wakil mereka; tidak dengan cara penunjukan langsung oleh Rasul, namun begitu, tugas majelis umat atau lembaga wakil rakyat tetap dengan kegiatannya bermusyawarah dan *muhasabah li al-ahkam*, mengoreksi kebijakan para pemimpin

Lebih lanjut Ibnu Siena yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad⁶⁹ menjelaskan bahwa, undang-undang dasar janganlah mencampuri soal-soal khusus (yang tidak prinsip), karena mencampurinya bisa merusakkan. Hukumnya akan berubah menurut perubahan masa, sedang akan membuat suatu hukum (dalam undang-undang) yang sifatnya

⁶⁸ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: IKIS, 2010), Cet. ke-1, h.

⁶⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1033 M), h. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, betapapun juga berhati-hatinya, tidaklah mungkin. Maka seharusnya soal-soal demikian diserahkan kepada majelis musyawarah.

Dalam hal ini,⁷⁰ ditonjolkannya majelis musyawarah yang bertugas untuk menampung segala persoalan itu, dengan mengingat kepentingan rakyat pada masa yang mereka hadapi. Dengan tidak mengurangi hak-hak majelis untuk membicarakan soal-soal besar yang diatur dalam undang-undang dasar atau undang-undang lainnya. Mereka harus memperhatikan proses kecerdasan rakyat, dan kebutuhan mereka dari masa kemasa, dan harus menampung semuanya itu didalam peraturan-peraturan yang membantu kemajuan dan kemakmuran rakyat.

Sebenarnya dalam rentang sejarah kepemimpinan Rasulullah saw. tidak terdapat lembaga musyawarah khusus secara permanen, akan tetapi Rasulullah saw. meminta pendapat kaum muslimin, terutama para sahabat dekat Rasulullah saw. tersebut, melalui proses alamiah, disadari atau tidak merupakan wakil kaum muslimin. Mereka memegang kedudukan yang sangat dipercaya selama jangka waktu lama dan dengan demikian diberi hak untuk mengambil keputusan-keputusan bersama mengenai semua masalah penting yang menyangkut umat. Menurut Abu al-A'la al-Maududi⁷¹ orang-orang inilah yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-aqd*.

⁷⁰ *Ibid*, h. 283.

⁷¹ Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke- 4, h. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Status, Fungsi, dan Wewenang *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Kehadiran *ahl al-hall wa al-aqd* sangat penting untuk menegakkan sistem Islam; karena lembaga musyawarah ini merupakan sendi pokok sistem pemerintahan atau ketatanegaraan.⁷² Disamping itu, *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai badan kontrol terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, atau perumus setiap permasalahan.

Yusuf al-Qardhawi yang dikutip oleh Artani Hasbi mengatakan,⁷³ bahwa ahli fiqh berpendapat, lembaga ini hanya mempunyai fungsi politik saja, yaitu memilih pemimpin, *barbai'at*, dan mengoreksi atau mengontrol tugas-tugas anggotanya, serta memecat pemimpin jika telah terbukti jelas menyimpang dari sumpah jabatannya. Keputusan *ahl al-syura* umumnya diambil atas dasar suara mayoritas, dengan catatan bahwa menurut Islam jumlah suara mayoritas bukan merupakan ukuran kebenaran.

Wewenang *ahl al-hall wa al-aqd* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Ahl al-hall wa al-aqd* memberikan masukan kepada pemimpin.
- b. Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum dan atau undang-undang kepada majelis atau *ahl al-hall wa al-aqd* agar dapat pengesahan.
- c. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.

⁷² Qadir Abu Faris, *op. cit.*, h. 141-142.

⁷³ Artani Hasbi, *op. cit.*, h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat.
- e. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.⁷⁴

Dari lima kewenangan diatas, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, yaitu memberikan masukan kepada pemimpin; ada dua yang argumentasi yang dijadikan sandaran, pertama menganalisa lewat telaah bahasa atas keumuman ayat yang diakui keabsahannya sebagai landasan terbentuknya iklim musyawarah, kedua, mencermati pelaku sejarah Rasulullah saw. *kedua*, pemimpin boleh mengajukan konsep atau rancangan hukum dan undang-undang kepada majelis *syura* atau *ahl al-hall wa al-aqd*, *ketiga*, Islam melarang adanya kekuasaan mutlak seorang pemimpin, dan kekuasaan mutlak hanya milik Allah swt. Oleh karena itu, mengontrol dan mengoreksi pemimpin merupakan langkah pengendalian yang efektif untuk menghindari pelaksanaan pemerintahan negara tiran yang tidak menghargai nilai-nilai musyawarah, *keempat*, *ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat dan *kelima*, *ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai hak membatasi kandidat yang akan menjadi pemimpin.

4. Dasar Hukum Tentang Majelis Syura dan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Secara eksplisit dalil tentang majelis *syura* dan *ahl al-hall wa al-aqd*, tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun sebutan tersebut

⁷⁴ *Ibid.*, h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya ada dalam sebutan fiqh di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substantial, dari dasar-dasar yang menyeluruh, dasar sebutan di *qiyaskan* dengan istilah musyawarat, umat, dan *uli amri*. Seperti dalam firman Allah swt. surah al-Syura ayat 38, ali-Imran ayat 104, an-Nisa ayat 59:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (Q. S. al-Syura 42: 38).*⁷⁵

Dalam firman Allah ini dibahas tiga masalah yang menyangkut tentang musyawarah:

Pertama: ” *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat.*” Abdurrahman bin Zaid yang dikutip oleh Al-Qurthubi mengatakan,⁷⁶ mereka adalah orang-orang Anshar di Madinah. Mereka menerima seruan untuk beriman kepada Rasulullah saw. ketika mereka mengutus dua belas kelompok dari mereka sebelum hijrah, dan mereka melaksanakannya pada waktunya, sesuai dengan syarat dan rukun-nya.

Kedua: “ *Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka,*” yakni mereka bermusyawarah dalam urusan mereka.

⁷⁵ Mushaf al-Azhar, *loc. cit.*

⁷⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), Cet. ke-2, jilid 16, h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syuuraa adalah mashdar dari *Syawartuhu* (aku bermusyawarah dengannya) seperti *Al-Busyraa*, *Adz-Dzkira*, dan yang lainnya. Sebelum Nabi saw. datang apabila orang-orang Anshar menghendaki suatu urusan maka mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut, kemudian barulah mereka melaksanakan hasil musyawarah itu. Allah kemudian menyanjung mereka karena hal itu. Demikianlah yang dikemukakan oleh An-Naqqasy yang dikutip oleh Al-Qurthubi

Ibnu Al-Arabi yang dikutip oleh Al-Qurthubi berkata,⁷⁷ “Musyawarah itu lebih dapat mempersatukan orang banyak, lebih membuka pikiran, dan merupakan sebab untuk sampai pada kebenaran. Tidaklah suatu kaum bermusyawarah sekalipun kecuali mereka akan diberi petunjuk.

Ketiga: “*Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka,*” maksudnya, dan terhadap sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkakhannya.⁷⁸

Selanjutnya, sebutan majelis *syura* dan *ahl al-hall wa al-aqd* diqiyaskan dengan sebutan umat, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam al-Qur’an surat ali-Imran ayat 104:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

⁷⁷ *Ibid*, h. 92.

⁷⁸ *Ibid*, h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.* (Q.S. ali-Imran ayat 104).⁷⁹

Imam Asy Syaukani mengatakan,⁸⁰ kalimat pada (*Dan hendaklah ada*) jumhur membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *nun*. Ini bisa juga dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* sesuai asalnya. Pada kalimat (*di antara kamu*) menunjukan sebagian, ada juga yang mengatakan untuk menerangkan jenis. Pendapat pertama lebih unggul, karena *amar ma'ruf nahyi mungkar* termasuk fardhu kifayah yang dikhususkan bagi ahli ilmu yang mengetahui bahwa apa yang mereka perintahkan itu baik dan apa yang mereka larang itu memang kemungkaran.

Kalimat pada (*menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar*) termasuk kategori '*athf khaash kepada 'aam* (menggabungkan yang khusus kepada yang umum) untuk menampakkan kemuliaan keduanya, dan bahwa keduanya merupakan kesempurnaan kebaikan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya untuk diserukan. Kata petunjuk pada kalimat (*mereka adalah*) kepada *ummatun* berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan setelahnya. Dan pada kalimat (*orang-orang yang beruntung*), yakni, dikhususkan dengan keberuntungan, dikemukakannya dalam bentuk *ta'rif (definitif)*

⁷⁹ Mushaf al-Azhar, *op.cit.*, h. 63.

⁸⁰ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. ke-1, jilid 2, h. 470-471.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beruntung adalah karena telah diketahui ,atau hakikat yang dapat diketahui oleh setiap orang.⁸¹

Lebih lanjut, sebutan majelis *syura* dan *ahl al-hall wa al-aqd* diqiyaskan dengan sebutan *ulil amri*, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. an-Nisa ayat 59).⁸²

Setelah Allah memerintahkan para hakim dan para pemimpin apabila mereka memutuskan keputusan diantara manusia agar memutuskan dengan haq, disini Allah memerintahkan manusia agar mentaati mereka disamping mentaati Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan-Nya dan menjahui apa-apa yang dilarang-Nya, serta mentaati Rasulullah saw. dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjahui apa-apa yang dilarangnya. *Ulil amri* adalah para (imam) pemimpin, para sultan, para hakim dan setiap orang

⁸¹ *Ibid*, h. 472.

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai kekuasaan secara syar'i, bukan yang mengikut thaghut. Maksudnya, mentaati mereka dengan melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan menjahui apa yang mereka larang selama itu bukan kemaksiatan, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat terhadap Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh riwayat valid dari Rasulullah saw. Jabir bin Abdullah dan Mujahid yang dikutip oleh Imam Asy-Syaukani mengatakan, bahwa ulil amri adalah ahlul qur'an dan ahlul ilmi. Demikian juga yang dikatakan oleh Malik dan Adh-Dhahak. Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa mereka adalah para sahabat Muhammad saw. Ibnu Katsir mengatakan, bahwa mereka adalah para cerdik cendekiawan. Pendapat pertama lebih tepat.⁸³

Pada kalimat (*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasul atau Sunnahnya*), *al munaaza'ah* adalah saling tarik menarik, *an-naz'* adalah tarikan, jadi seolah-olah masing-masing pihak mencabut dan menarik argumen pihak lainnya. Maksudnya adalah perbedaan pendapat dan perdebatan.

Konteks kalimat (*tentang sesuatu*) menunjukkan kepada perkara-perkara agama dan dunia, namun ketika Allah menyebutkan yang artinya, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) menjadi jelas bahwa sesuatu yang diperdebatkan itu adalah khusus berkenaan dengan urusan agama, tidak termasuk dunia. Maksud

⁸³ Imam Asy-Syaukani, *op. cit.*, h. 904.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan kepada Allah adalah dikembalikan kepada Kitab-Nya yang mulia, dan mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada Sunnahnya setelah beliau tiada, adapun sewaktu beliau masih hidup adalah ditanyakan kepadanya. Inilah makna mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁸⁴

Dan pada kalimat (*jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian*), ini menunjukkan bahwa pengembalian itu wajib dilakukan oleh orang-orang yang bersilang pendapat, dan bahwa itu adalah kriteria orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan kepada *ar-radd* (pengembalian) yang diperintahkan.

Kalimat (*adalah lebih utama*) bagimu, (*dan lebih baik akibatnya*), *ta'wiilan: marji'an*, dari *al aul, aala-ya'uulu ilaa kadza* (kembali kepada demikian). Maknanya: bahwa pengembalian itu adalah lebih baik bagi kalian dan dampaknya lebih baik untuk kalian jadikan rujukan.⁸⁵

Menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh H.A Djazuli⁸⁶ berkaitan dengan *ulil amri* atau perwakilan ini telah berkata, “Demikianlah, dikalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan didalam mengatur kemashalatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura* atau *ahl al-hall wa al'aqd* didalam Islam”.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 905.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 905-906.

⁸⁶ H. A. Djazuli, *op. cit.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

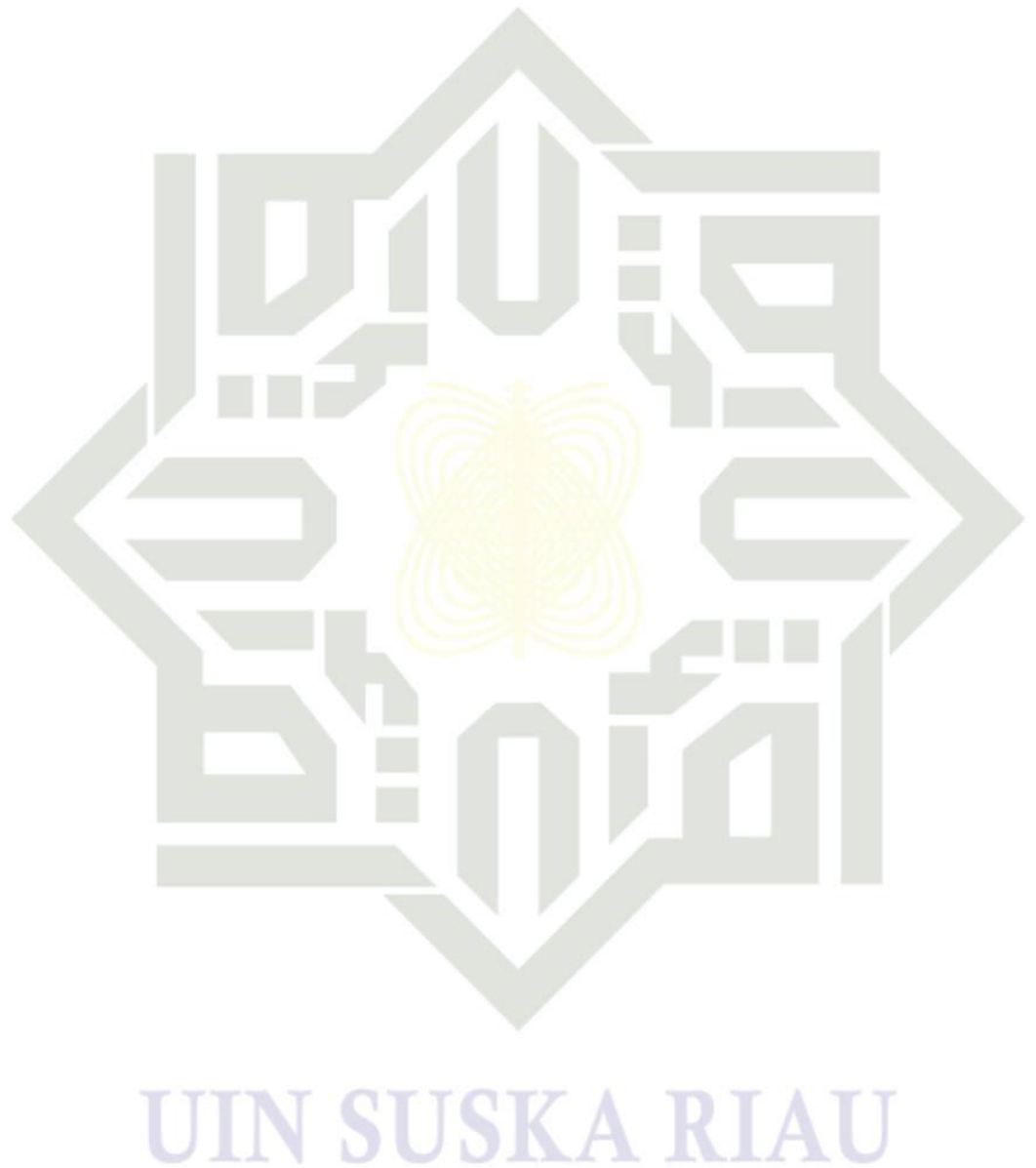
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah *ahlul ikhtiyar* dan mereka juga adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemashalatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi saja. Disamping itu harus ijtihad anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* mengacu pada prinsip *jalb al-mushalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁸⁷

Abdul Wahhab Khallaf menambahkan yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasulnya adalah mengikuti al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati *uli al-amr* antara umat Islam mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid, karena mereka adalah *uli al-amr* dalam bidang hukum syara'. Lebih lanjut, perintah mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti *qiyas* ketika hukum dari kasus yang diperselisihkan itu tidak

⁸⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyah* (Syu'un al-Dusturiyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyah, (al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taqqaddum, 197 H/1977 M), h. 59.

dijumpai dalam nash dan ijma'. Dengan demikian, majelis *syura, ahl al-hall wa al-aqd* dan umat dalam Al Qur'an adalah bagian dari *uli al-amr* yaitu sebagai lembaga legislatif atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸⁸



⁸⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. ke-3, h.17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data dalam penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan konsep *siyasaḥ syar'iyah* meskipun belum sempurna. Hal ini dapat dilihat pada:

1. Fungsi legislasi sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang sudah dihasilkan oleh BPD dan kepala desa Tentang APBDesa No. 004 Tahun 2018 dan Penetapan Larangan Merusak Lingkungan Sumber Daya Ikan/Udang Mencuri Kelapa Sawit No. 006 Tahun 2019. Disisi lain BPD belum melaksanakan fungsinya dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan belum dibahasnya peraturan desa yang diusulkan oleh kepala desa kepada BPD Tentang Narkoba dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Fungsi pengayom belum dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dimana BPD jarang melaksanakan musyawarah mufakat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Fungsi pengawasan belum juga dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan adanya keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan pemerintahan desa yang melemahkan secara konstitusi dari fungsi BPD itu sendiri, sehingga dalam hal pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Simalinyang antara lain: *pertama* faktor pendukung adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati kampar, dukungan masyarakat, dan pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa. *kedua* faktor penghambat adalah, sumber daya manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, dan adanya hubungan kekeluargaan.
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang jika ditinjau berdasarkan fiqh *siyasa* lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana *syura* dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw., menjunjung tinggi konsep *syura*, dan sesuai dengan konsep kepemimpinan.

B. Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, antara lain:

1. Kepada BPD agar diharapkan lebih tajam dalam menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tidak melakukan rangkap jabatan, serta melaksanakan fungsinya dengan lebih maksimal lagi.
2. Kepada BPD dan pemerintahan desa agar selalu bekerjasama dalam menciptakan kemashalatan dalam bermasyarakat, serta bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa ada unsur kekeluargaan yang menghalanginya.

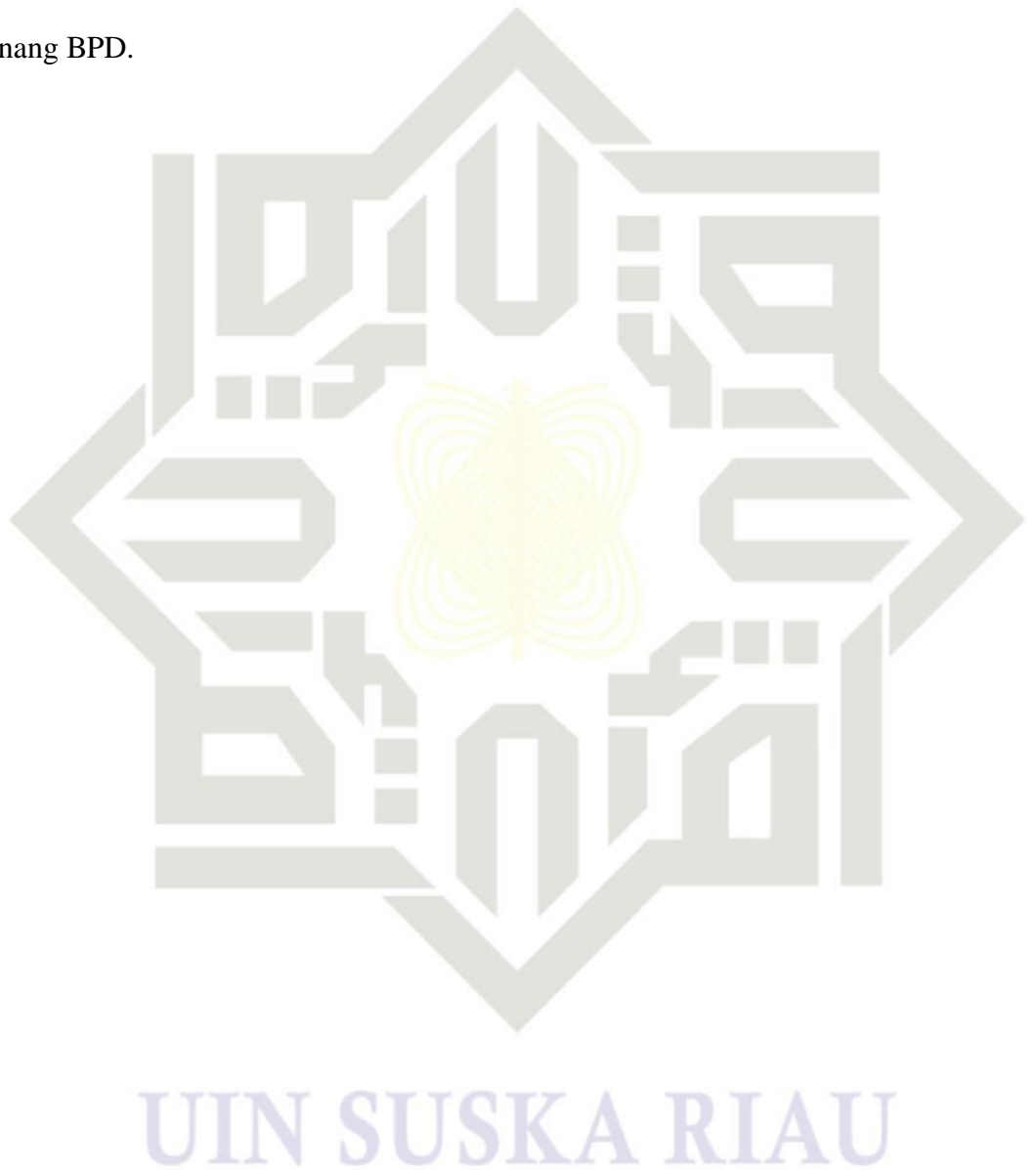
3. Kepada pemerintahan daerah sebagai pengambil kebijakan supaya membuat sebuah peraturan tentang BPD agar peraturan yang dihasilkan oleh BPD berjalan secara maksimal, serta melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada BPD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang BPD.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber dari buku-buku:

- Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke- 4.
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Abdul Hamid Isma'il Al-Anshari, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqraiyyah*, tt, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1980).
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Adi, Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-3.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1033 M).
- _____, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. ke-5.
- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), Cet. ke-1.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet. ke-10, jilid 3.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Diazuli, H. A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet. ke-2.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. ke-2.
- Faris, Qadir Abu, *Al-Nidzam al-Siyasi fi al-Islam*, tt, (Yogyakarta: PLP2M, 1987).
- Hasbi, Artani, *Musyawaharah & Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. ke-3.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Imam Al-Mawardi, alih bahasa: Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006).

_____, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. ke-1, jilid 2.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1.

Jimmy, M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Jubaedah, Pipin Syarifin & Dedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cet. ke-2.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010).

Moelong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36.

Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal, 2010).

Mulia, Musda, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).

Palungan, Suyuthi, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-5.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet. ke-74.

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012).

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-1.

Siadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993).

Sopiah, Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010).

Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), Cet. ke-2, jilid 16.

Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2007), Cet. ke-2.

Tahir, Sadu Wasistiono dan Irawan, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2007), Cet. ke-1.

Widjaja, A. W, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

Yasid, Abu, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. ke-2.

Zakawi, Somad dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Tri Sakti, 2004).

Sumber dari Jurnal dan Website:

Aryadji, Berdesa, dalam <http://www.berdesa.com/apa-tugas-utama-bpd-ini-jawabannya.html>.

Minardi Kusuma, Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no-6.html>.

Nurhadi, Menakar Eksistensi BPD Dalam Penyelenggaraan Desa, dalam <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggraan-desa.html>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber dari aturan Hukum:

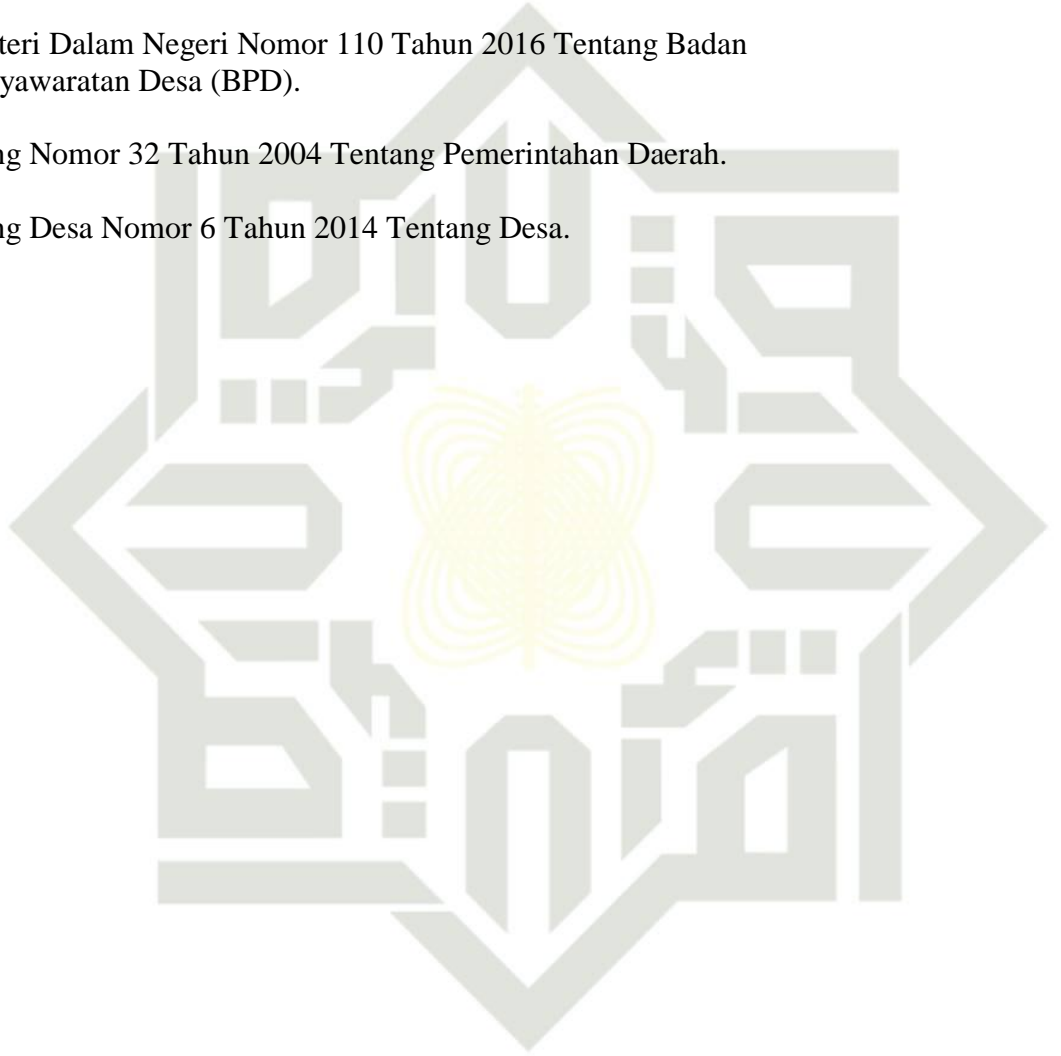
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyash: Studi Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”

PEDOMAN WAWANCARA

A Fungsi Legislasi Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

1. Apa saja peraturan desa yang sudah dihasilkan oleh BPD untuk kemashalatan masyarakat (Herman Hadi Ketua BPD) ?
2. Apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah memperhatikan kondisi sosial budaya dan potensi-potensi yang ada didesa (Rianto Wakil Ketua BPD) ?
3. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (Zamri Kepala Desa) ?
4. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (Darmawan Sekretaris Desa) ?
5. Apa saja rancangan peraturan desa yang belum dibahas dan disepakati oleh BPD (Herman Hadi Ketua BPD dan Andyra Saputra Sekretaris BPD) ?

B Fungsi Pengayom Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

1. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Zamri Kepala Desa) ?
2. Apakah hubungan antara sesama anggota BPD terjalin dengan baik (Herman Hadi Ketua BPD) ?
3. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Mahzawer salah satu anggota BPD) ?
4. Bagaimana menurut bapak selaku salah satu tokoh masyarakat terhadap fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Toher dan Firdaus) ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Fungsi Pengawasan Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

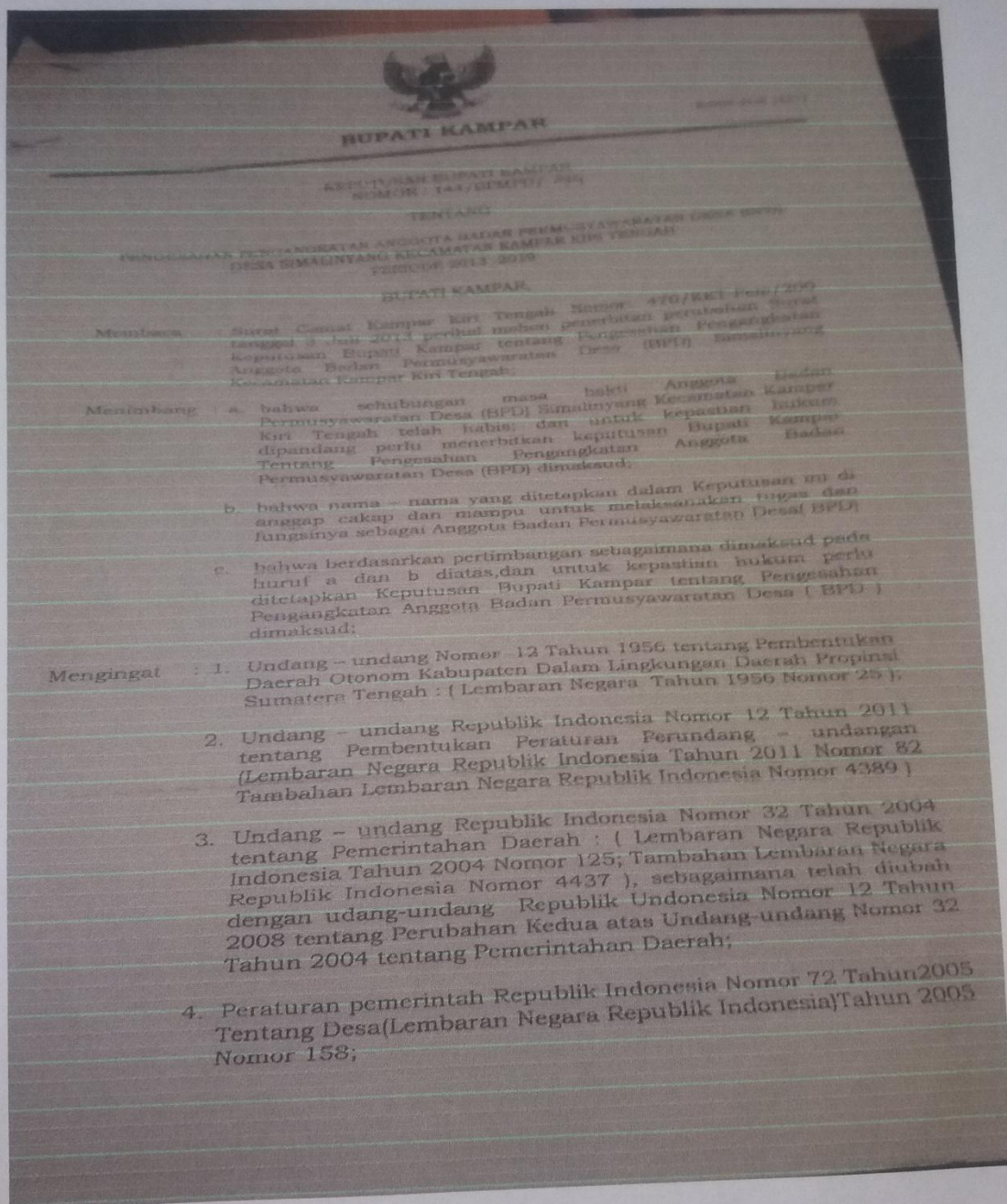
1. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Herman Hadi Ketua BPD) ?
2. Apakah benar adanya unsur kekeluargaan antara BPD dan pemerintahan desa (Zamri Kepala Desa) ?
3. Apakah BPD sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Nur Alfandri salah satu anggota BPD) ?
4. Apakah pola pengawasan sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa (Darmawan Sekretaris Desa) ?

D Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Fungsi BPD

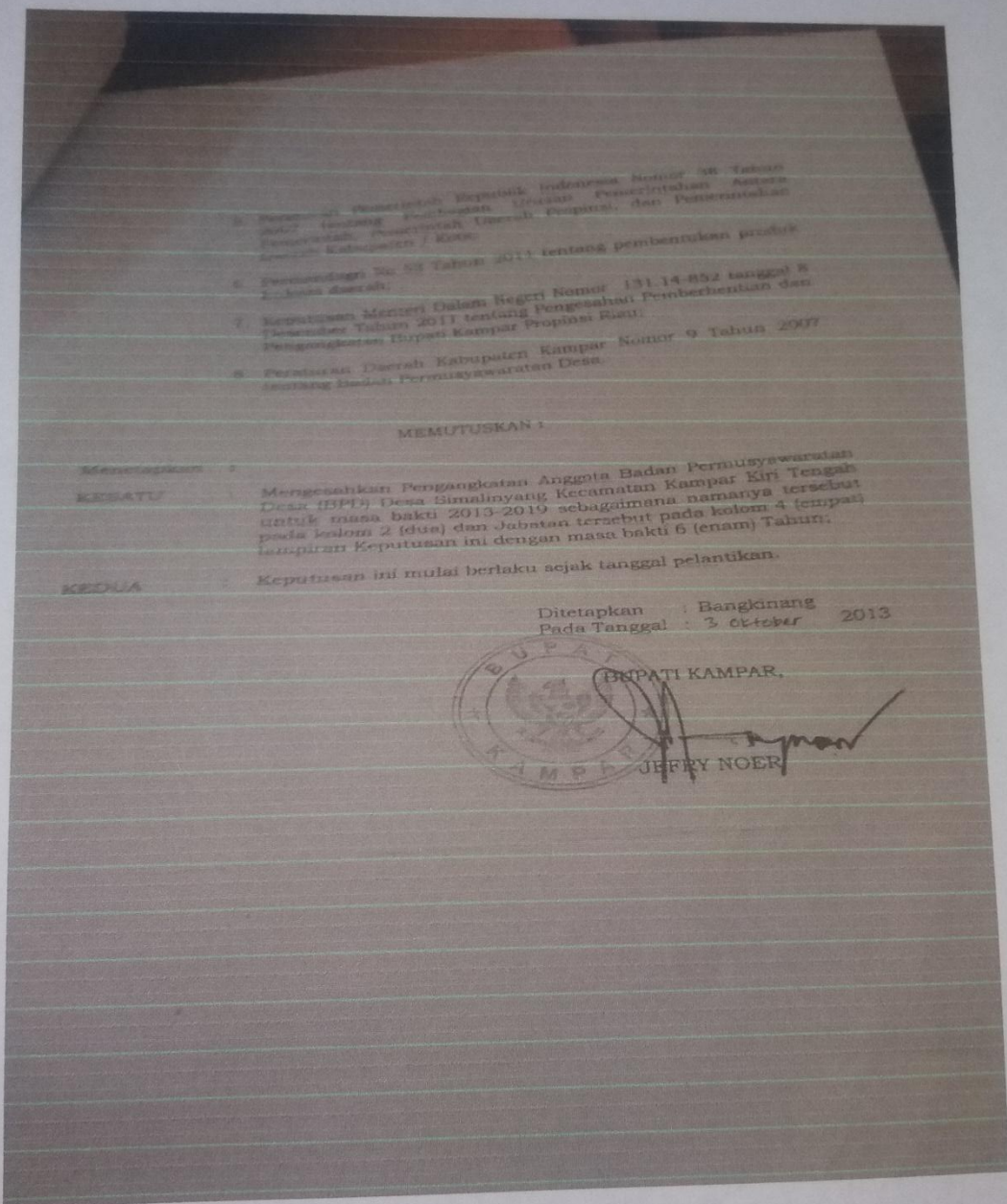
1. Apa saja faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD (Herman Hadi Ketua BPD dan Rianto Wakil Ketua BPD) ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD (Zamri Kepala Desa, Herman Hadi Ketua BPD, dan Darmawan Sekretaris Desa) ?



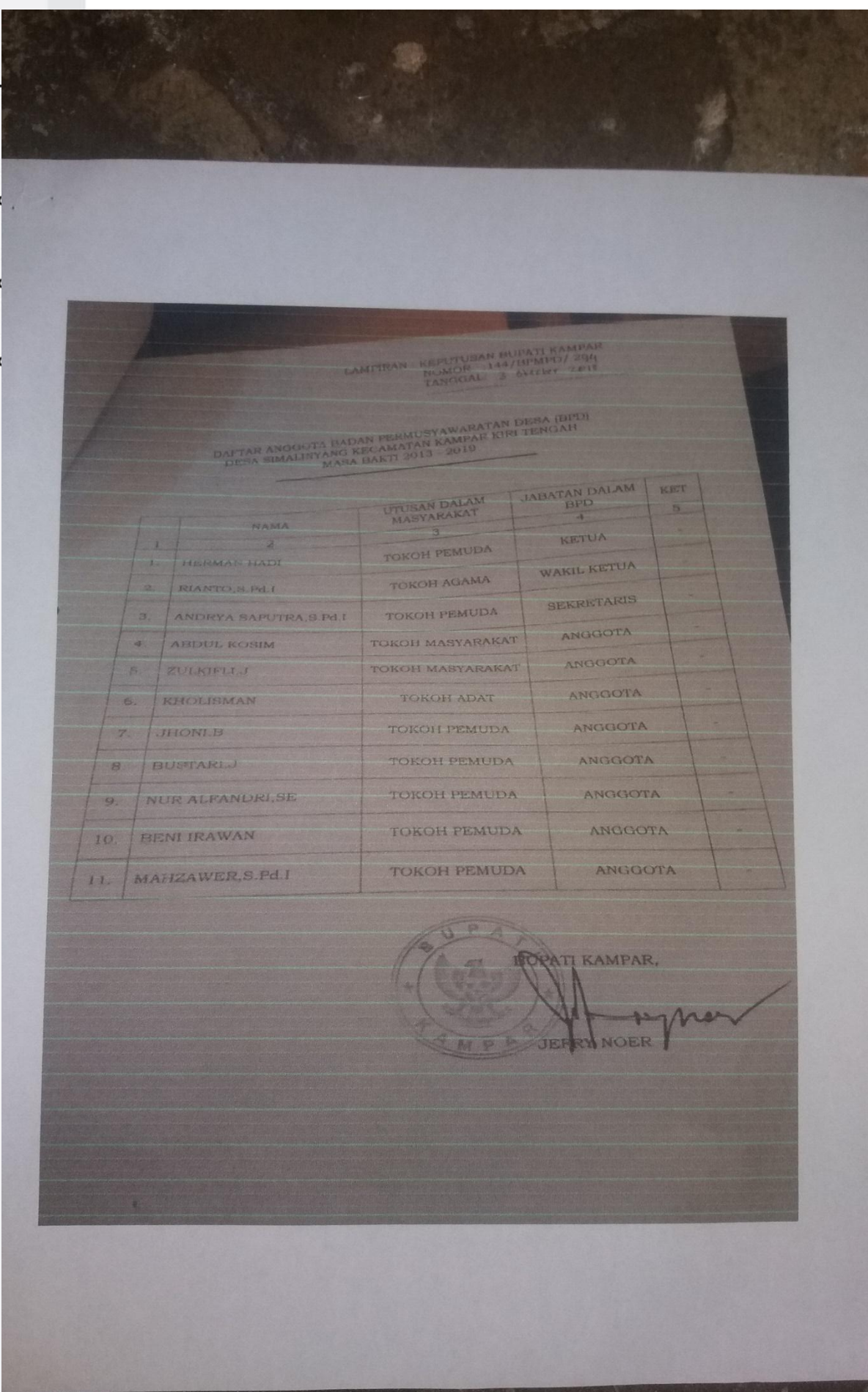
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



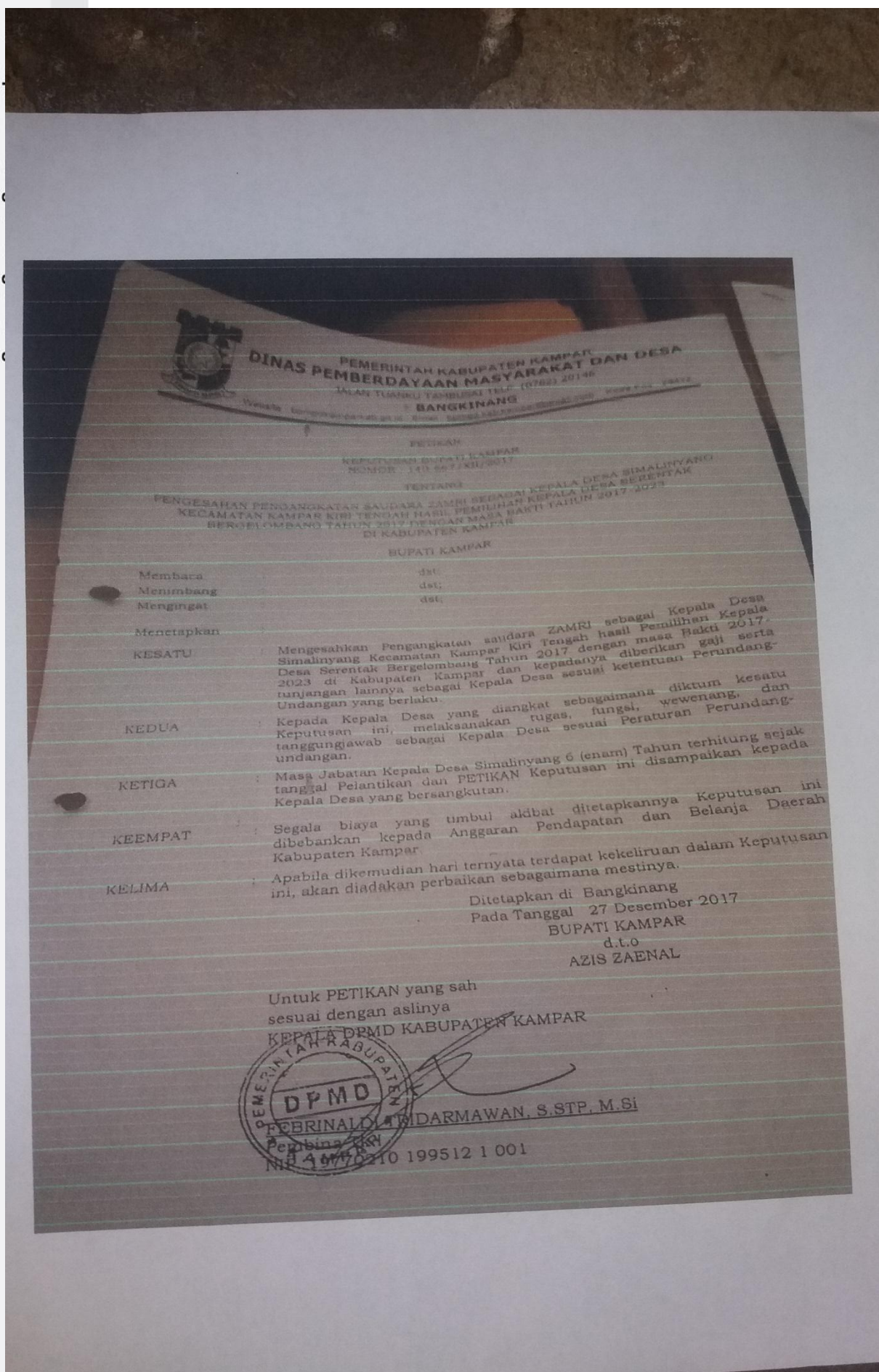
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



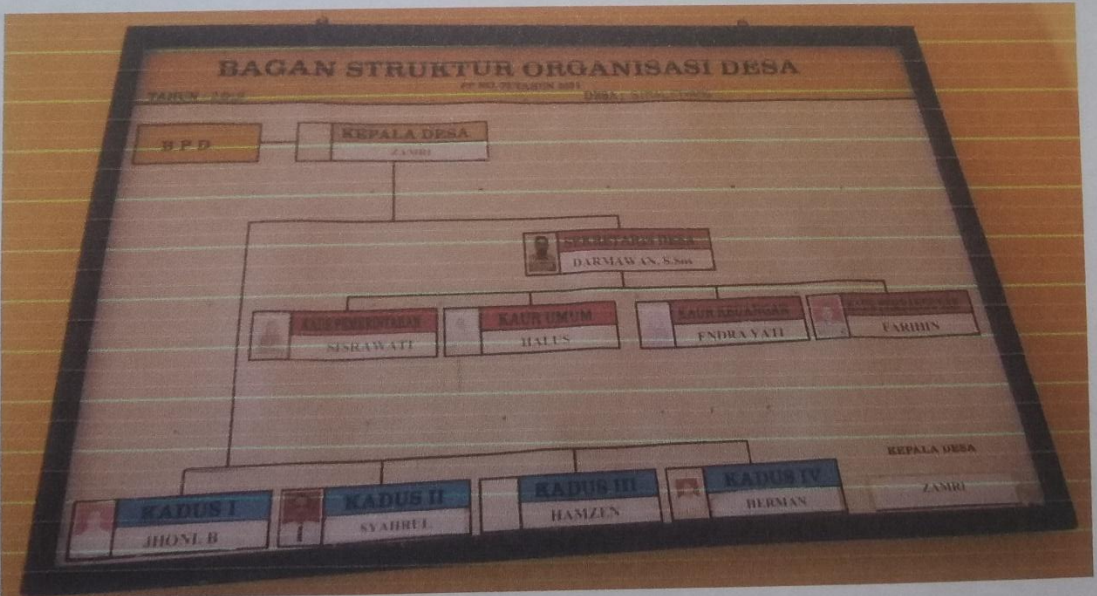
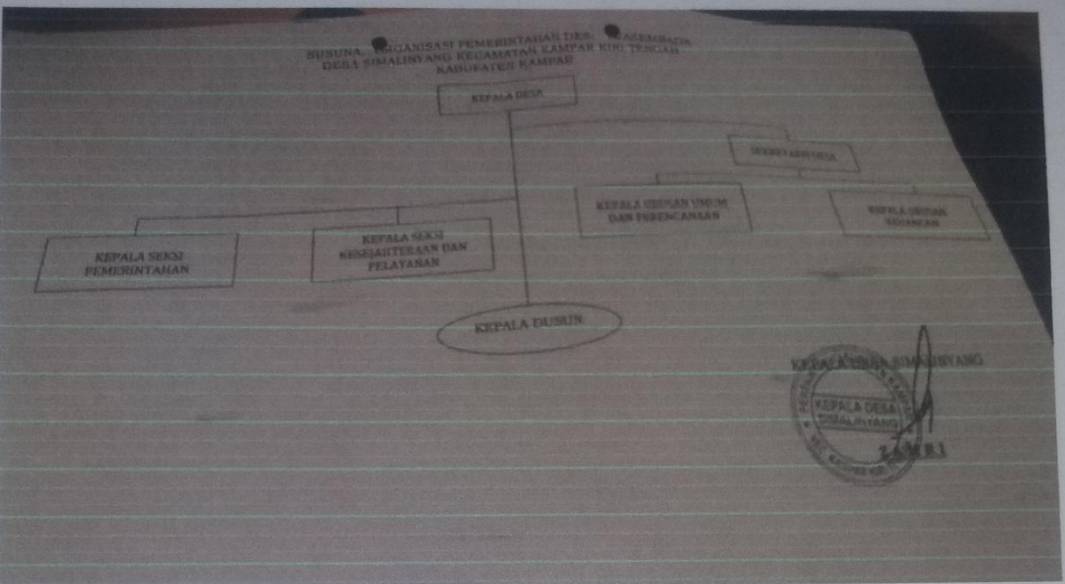
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SIMALINYANG

KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Alamat : Jl. Raya Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 004 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDES-P) TAHUN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMALINYANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Kabupaten Kampar Tahun 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian dan rincian Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016..

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 4 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak, dan Bagian Dari Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Kampar.
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 4 Tahun 2017 Tentang tata cara pengalokasian dan penetapan bagian dari Hasil Bagi Pajak setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran Tahun 2018.
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa , Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 37 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar.
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Riau Kepada Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Simalinyang membahas Rancangan Peraturan Desa Simalinyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Simalinyang menyepakati Rancangan Peraturan Desa Simalinyang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

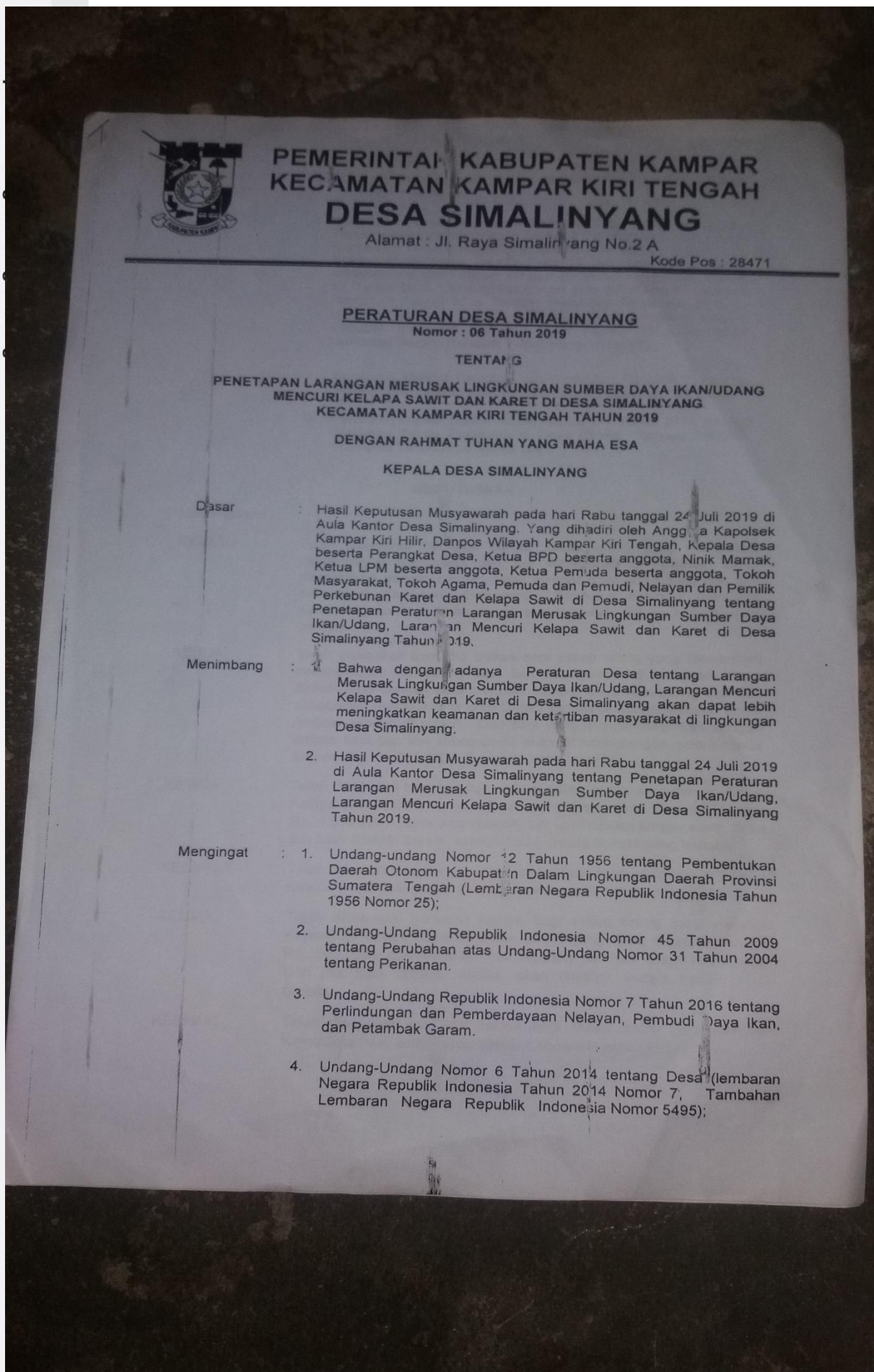
Disetujui di : Simalinyang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMALINYANG

KEMANA
HERMAN HADI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;

MEMUTUSKAN :

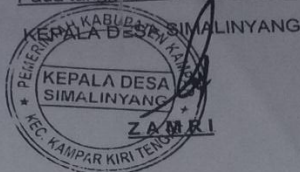
Menetapkan :

- KESATU : Telah disepakati bersama bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan/udang dan lain sebagainya di kawasan Desa Simalinyang dengan cara merusak sumber daya ikan/udang dan lain sebagainya (meracuni, menyentrum, memukat harimau, membom ikan/udang dan lain sebagainya) akan ditindak secara hukum yang berlaku.
- KEDUA : Telah disepakati bersama bahwa bagi setiap orang yang melakukan penangkapan ikan/udang dan lain sebagainya di kawasan Desa Simalinyang dengan cara merusak sumber daya ikan/udang dan lain sebagainya (mengucau di area Panau kecuali di Sungai Kampar untuk mencari umpan di pulau). Dan bagi yang mengandung ikan dengan umpan babi dan lain sebagainya akan ditindak dengan cara didenda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Telah disepakati bersama bahwa bagi setiap orang yang mencuri buah Kelapa Sawit dalam kawasan Desa Simalinyang akan didenda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per satu tandan kelapa sawit. Dan jika tidak dibayar denda, akan ditindak secara hukum yang berlaku.
- KEEMPAT : Telah disepakati bersama bahwa bagi setiap orang yang membeli buah Kelapa Sawit hasil curian akan ditindak secara hukum yang berlaku.
- KELIMA : Telah disepakati bersama bahwa bagi setiap orang yang mencuri Karet/Gota dalam kawasan Desa Simalinyang akan didenda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per Kilo Gram Karet/Gota. Dan jika tidak dibayar denda, akan ditindak secara hukum yang berlaku.
- KEENAM : Telah disepakati bersama bahwa bagi setiap orang yang membeli Karet/Gota hasil curian akan ditindak secara hukum yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simalinyang
Pada tanggal : 26 Juli 2019



Diundangkan : di Simalinyang
Pada tanggal : 26 Juli 2019

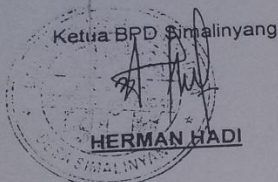
Sekretaris Desa


DARMAWAN, S. Sos
NIP. 19671020 200906 1 004

Lembaran Desa Simalinyang Tahun 2019 Nomor 06

Disetujui Oleh :

Ketua LPM Desa Simalinyang




SYAFRI

“ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar “

DOKUMENTASI



Herman Hadi, Ketua BPD, Wawancara, Simalinyang, 04 September 2019



Rianto Wakil Ketua BPD, Wawancara, Simalinyang, 04 September 2019



Zamri Kepala Desa, Wawancara, Simalinyang, 04 September 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Darmawan, Sekretaris Desa, Wawancara, Simalinyang, 04 September 2019



Andrya Saputra, Sekretaris BPD, Wawancara, Simalinyang, 04 September 2019



Zamri, Kepala Desa, Wawancara, Simalinyang, 10 September 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Herman Hadi, Ketua BPD, Wawancara, Simalinyang, 10 September 2019



Mahzawer, Salah Satu Anggota BPD, Wawancara, Simalinyang, 10 September 2019



Toher Salah Satu Tokoh Masyarakat, Wawancara, Simalinyang, 10 September 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Firdaus, Salah Satu Tokoh Masyarakat, Wawancara, Simalinyang, 10 September 2019



Herman Hadi, Ketua BPD, Wawancara, Simalinyang, 16 September 2019



Zamri, Kepala Desa, Wawancara, Simalinyang, 16 September 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nur Asandri, Salah Satu Anggota BPD, Wawancara, Simalinyang, 16 September 2019



Darmawan, Sekretaris Desa, Wawancara, Simalinyang, 16 September 2019



Herman Hadi, Ketua BPD, Wawancara, Simalinyang, 20 September 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rianto, Wakil Ketua BPD, Wawancara, Simalinyang, 20 September 2019



Zamri, Kepala Desa, Wawancara, Simalinyang, 20 September 2019



Darmawan, Sekretaris Desa, Wawancara, Simalinyang, 20 September 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERSPEKTIF FIQH *SIYASAH*: STUDI DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh :

Nama : **DIAN SAPUTRA**
NIM : 11524104031
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu 06 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Darmawan Tia Indraajaya, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, MA

Penguji II
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6726/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : DIAN SAPUTRA
N I M : 11524104031
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 26 JUNI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Agustus 2019



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PERAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) MERUMUSKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI DI
DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN
KAMPAR ditulis oleh saudara :

Nama : DIAN SAPUTRA
NIM : 11524104031
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Senin/20 Mei 2019
Narasumber : Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asferdi, S. Ag, M.Si
NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 22 Mei 2019
Narasumber

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
NIP. 19591231 198703 1 037

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/24617
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5931/2019 Tanggal 22 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

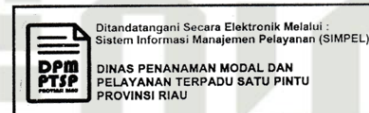
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DIAN SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11524104031 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MERUMUSKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA SIMALINYANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Juli 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/852

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24617 tanggal 24 Juli 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : DIAN SAPUTRA |
| 2. NIM | : 11524104031 |
| 3. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : STUDI DI DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : KANTOR DESA SIMALINYANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 2 September 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kasi. Kesatuan Bangsa


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Kampar Kiri Tengah di Simalinyang
2. Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- ④ Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
 JL. RAYA PEKANBARU - LIPAT KAIN KM. 42
 SIMALINYANG

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/34

Camat Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/852 Tanggal 2 September 2019 dengan ini memberi rekomendasi /Izin Penelitian Kepada :

Nama : DIAN SAPUTRA
 Nim : 11524104031
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERFEKTIF FIQH SIYASAH : STUDI DI DESA SIMALINYANG
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
 Lokasi : KANTOR DESA SIMALINYANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang ada hubungannya dengan kegiatan riset /pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian /pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.
3. Demikian rekomendasi ini diberikan ,agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset ini terimakasih.

Di keluarkan di simalinyang
 Pada tanggal 3 september 2019
 Camat Kampar Kiri Tengah



Drs. MARTIYUS

NIP. 1986031 010

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Simalinyang di Simalinyang
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
DESA SIMALINYANG**

Alamat : Jl. Raya Simalinyang No. 2.A

Kode Pos : 28471

REKOMENDASI

Nomor : 420/SML-Pemt/324

Berdasarkan Rekomendasi dari Camat Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/341 tanggal 03 September 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: DIAN SAPUTRA
NIM	: 11524104031
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Untuk Melakukan Penelitian di	: Kantor Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simalinyang
Pada tanggal : 03 September 2019
Kepala Desa Simalinyang



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Saputra
 NIM : 11524104031
 Tempat / Tanggal Lahir : Simalinyang, 04 Juli 1997
 Program Studi / Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : IX/ 9
 No HP : 082387956059
 Alamat : Kubang Jaya, Gg. Sukma

Dengan ini menyatakan bahwa, saya benar telah selesai meneliti / melaksanakan riset pada:

Nama Tempat Penelitian : Kantor Desa Simalinyang / BPD
 Alamat : Desa Simalinyang
 Judul Penelitian : Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan
 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
 Waktu Penelitian : 22 Juli-20 September 2019

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan pembohongan / penipuan terhadap pernyataan saya ini, maka saya siap menerima segala resiko.

Pekanbaru, Oktober 2019
 Yang menyatakan


Dian Saputra
 NIM. 11524104031

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul; “ Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar “, yang ditulis oleh:

Nama : Dian Saputra
 Tempat/ Tgl. Lahir : Simalinyang, 04 Juli 1997
 NIM : 11524104031
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syari’ah dan Hukum
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Simalinyang, Oktober 2019
 Ketua BPD Desa Simalinyang

 Herman Hadi

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh *Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”

PEDOMAN WAWANCARA

A. Fungsi Legislasi Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

1. Apa saja peraturan desa yang sudah dihasilkan oleh BPD untuk kemashalatan masyarakat (Herman Hadi Ketua BPD) ?
2. Apakah peraturan desa yang dihasilkan sudah memperhatikan kondisi sosial budaya dan potensi-potensi yang ada didesa (Rianto Wakil Ketua BPD) ?
3. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (Zamri Kepala Desa) ?
4. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (Darmawan Sekretaris Desa) ?
5. Apa saja rancangan peraturan desa yang belum dibahas dan disepakati oleh BPD (Herman Hadi Ketua BPD dan Andyra Saputra Sekretaris BPD) ?

B. Fungsi Pengayom Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

1. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Zamri Kepala Desa) ?
2. Apakah hubungan antara sesama anggota BPD terjalin dengan baik (Herman Hadi Ketua BPD) ?
3. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Mahzawer salah satu anggota BPD) ?
4. Bagaimana menurut bapak selaku salah satu tokoh masyarakat terhadap fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Toher dan Firdaus) ?

C. Fungsi Pengawasan Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

1. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Herman Hadi Ketua BPD) ?
2. Apakah benar adanya unsur kekeluargaan antara BPD dan pemerintahan desa (Zamri Kepala Desa) ?
3. Apakah BPD sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Nur Alfandri salah satu anggota BPD) ?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah pola pengawasan sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa (Darmawan Sekretaris Desa) ?

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Fungsi BPD

1. Apa saja faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD (Herman Hadi Ketua BPD dan Rianto Wakil Ketua BPD) ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD (Zamri Kepala Desa, Herman Hadi Ketua BPD, dan Darmawan Sekretaris Desa) ?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **DIAN SAPUTRA**
 NIM : **11524104031**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
 Judul : **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI DI DESA SIMALINYANG
 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR**

Pembimbing : **Dr. Arisman, M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dian Saputra, skripsi ini ditulis oleh seorang Putra Melayu Riau dari Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara pasangan suami istri Bapak Zulfahmi dan Ibu Darmi. Saudara abang sekandung laki-laki pertama bernama Diki Saputra (Alm), Saudara abang sekandung laki-laki kedua bernama Diko Saputra, saudari adik sekandung perempuan ke empat bernama Della Mustika, dan saudara adik sekandung laki-laki kelima bernama Zul Ikhwan Otovian.

Penulis lahir pada hari Jum'at 04 Juli 1997. Mengawali pendidikan di bangku TK pada tahun 2002. Melanjutkan di SDN 006/001 Simalinyang pada tahun 2003 dan Lulus pada tahun 2008. Selanjutnya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Wasi'ah Simalinyang selama 6 (enam) tahun dan Lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Program Strata Satu (S1) pada tahun 2015.

Penulis menjalani Program Magang di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan dengan Progam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2018.

Pada tanggal 06 November 2019 M/09 Rabi'ul Awwal 1441 H, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS melalui sidang terbuka Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).